



PEMEKARAN DAERAH DAN STABILITAS POLITIK: ANALISIS SISTEM POLITIK INDONESIA DI MERAUKE

REGIONAL EXPANSION AND POLITICAL STABILITY: ANALYSIS OF THE INDONESIAN POLITICAL SYSTEM IN MERAUKE

Martinus Wika

STISIPOL Yaleka Maro Merauke

Email: martinuswika202@gmail.com

Abstract

Article Info

Article history :

Received : 24-12-2024

Revised : 26-12-2024

Accepted : 28-12-2024

Published: 31-12-2024

Regional expansion is one of the decentralization strategies that aims to improve government effectiveness, accelerate development, and expand access to public services. However, in its implementation, regional expansion also faces various challenges, especially related to political stability and effective governance. This study aims to analyze the impact of regional expansion in Merauke on political stability, power dynamics, political participation, and the relationship between the central government, regions, and local communities. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Primary data were obtained through in-depth interviews with stakeholders, such as regional officials, community leaders, and academics, while secondary data were collected from policy documents, research reports, and journal articles. Data collection techniques include semi-structured interviews, field observations, and documentation studies. The data obtained were analyzed using thematic analysis and triangulation techniques to ensure the validity and accuracy of the research results. The results show that regional expansion in Merauke has a significant impact on governance, political dynamics, and the social and economic welfare of the community. The main challenges faced include limited administrative capacity, unequal distribution of resources, and political tensions between local elites, indigenous peoples, and immigrants. Therefore, a sustainable strategy is needed to ensure that the expansion runs according to its original objectives. Strengthening the capacity of local governments, implementing affirmative policies for indigenous peoples, and an expansion model based on academic studies are important steps in supporting political stability and sustainable development. With a more inclusive and targeted approach, expansion can be an effective decentralization instrument and bring real benefits to the community.

Keywords: *Regional expansion, political stability, governance, indigenous peoples*

Abstrak

Pemekaran daerah merupakan salah satu strategi desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan memperluas akses layanan publik. Namun, dalam implementasinya, pemekaran daerah juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran daerah di Merauke terhadap stabilitas politik, dinamika kekuasaan, partisipasi politik, serta hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan akademisi, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan, laporan penelitian, serta artikel jurnal. Teknik pengumpulan data



mencakup wawancara semi-struktural, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan triangulasi untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah di Merauke memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, dinamika politik, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas administratif, ketimpangan distribusi sumber daya, serta ketegangan politik antara elite lokal, masyarakat adat, dan pendatang. Oleh karena itu, strategi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pemekaran berjalan sesuai tujuan awalnya. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah, penerapan kebijakan afirmatif bagi masyarakat adat, serta model pemekaran berbasis kajian akademik menjadi langkah penting dalam mendukung stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terarah, pemekaran dapat menjadi instrumen desentralisasi yang efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pemekaran daerah, stabilitas politik, tata kelola pemerintahan, masyarakat adat.

PENDAHULUAN

Pemekaran daerah merupakan salah satu kebijakan strategis dalam sistem politik Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di daerah (Siangchokyoo, Klinger, and Campion 2020). Kebijakan ini didasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di Papua, termasuk Merauke, pemekaran wilayah telah menjadi isu yang cukup menonjol karena adanya dorongan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, serta mengakomodasi kepentingan politik dan budaya local (Garbis et al. 2023). Namun, di samping manfaat yang diharapkan, pemekaran daerah juga menghadirkan tantangan dalam aspek stabilitas politik, tata kelola pemerintahan, serta dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat setempat.

Merauke, sebagai salah satu wilayah di Papua Selatan, memiliki karakteristik sosial dan politik yang unik dengan keberagaman etnis dan budaya (Pajarianto, Pribad, and Sari 2022). Pemekaran yang terjadi di wilayah ini sering kali berkaitan dengan tuntutan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan serta representasi politik yang lebih inklusif. Namun, proses pemekaran juga dapat memunculkan dinamika politik yang kompleks, termasuk potensi konflik kepentingan antara kelompok masyarakat, elite politik, serta pemerintah pusat dan daerah (Le Galès 2021). Stabilitas politik di Merauke pascapemekaran sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses ini dikelola, terutama dalam hal distribusi kekuasaan, pengalokasian sumber daya, dan penguatan kapasitas pemerintahan daerah yang baru terbentuk.

Dalam konteks sistem politik Indonesia, pemekaran daerah di Merauke menjadi cerminan dari interaksi antara kebijakan desentralisasi dan tantangan stabilitas politik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemekaran daerah di Merauke mempengaruhi dinamika politik lokal, termasuk aspek legitimasi pemerintahan, partisipasi politik (Azizah, Nkwede, and Armoyu 2021), serta keseimbangan antara kepentingan lokal dan nasional. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas politik pascapemekaran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengelola pemekaran daerah di Indonesia.

Meskipun pemekaran daerah di Merauke bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pemerintahan, implementasinya menghadapi berbagai permasalahan di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan dalam distribusi sumber daya, baik dari



segi anggaran, infrastruktur, maupun tenaga kerja pemerintahan. Banyak daerah hasil pemekaran mengalami keterbatasan dalam kapasitas administratif dan manajerial (Hoffmann 2022), sehingga pelayanan publik tidak berjalan optimal. Selain itu, alokasi dana dari pemerintah pusat sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan di daerah baru, menyebabkan ketimpangan dan ketergantungan terhadap bantuan keuangan.

Permasalahan lain yang muncul adalah meningkatnya ketegangan politik di tingkat lokal akibat persaingan kepentingan antara elite politik, kelompok masyarakat adat, dan pendatang. Proses pemekaran sering kali memunculkan konflik terkait batas wilayah, distribusi jabatan pemerintahan, serta hak atas sumber daya alam. Ketidakjelasan dalam mekanisme pembagian kekuasaan dan kebijakan afirmatif bagi masyarakat asli juga menjadi pemicu ketidakstabilan politik (Trzciński 2022). Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial dan memperlemah kohesi masyarakat, sehingga tujuan utama pemekaran dalam meningkatkan kesejahteraan justru sulit tercapai.

Kesenjangan yang muncul dalam pemekaran daerah di Merauke dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu kesenjangan akses terhadap layanan publik, ketimpangan ekonomi, dan perbedaan dalam representasi politik. Daerah hasil pemekaran sering kali mengalami keterbatasan dalam infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi (Trzciński 2022), yang menghambat pemerataan pembangunan. Secara ekonomi, pemekaran belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan, karena masih ada ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara masyarakat asli dan pendatang dalam mengakses peluang ekonomi. Dari sisi politik, muncul kesenjangan dalam distribusi kekuasaan, di mana kelompok tertentu, terutama elite lokal, lebih diuntungkan dibandingkan masyarakat umum, terutama masyarakat adat yang sering kali merasa kurang terwakili dalam struktur pemerintahan daerah baru. Jika kesenjangan ini tidak segera diatasi dengan kebijakan yang tepat, maka pemekaran daerah dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, alih-alih menjadi solusi bagi pemerataan pembangunan dan stabilitas politik.

Urgensi pembahasan mengenai pemekaran daerah dan stabilitas politik di Merauke terletak pada dampaknya yang luas terhadap tata kelola pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan harmoni sosial. Jika pemekaran tidak dikelola dengan baik, maka alih-alih membawa manfaat, justru dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, memperbesar konflik politik, dan menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap dinamika politik pascapemekaran menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Makuyana, Makoni, and Lucrezi 2024). Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, pemerintah dapat mengoptimalkan kebijakan desentralisasi agar benar-benar membawa perubahan positif bagi masyarakat Merauke, sekaligus memastikan stabilitas politik tetap terjaga dalam sistem politik Indonesia secara keseluruhan.

Kebaruan dalam pembahasan ini terletak pada analisis mendalam mengenai dampak pemekaran daerah di Merauke terhadap stabilitas politik dalam konteks sistem politik Indonesia yang terus berkembang. Berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek administratif dan ekonomi, penelitian ini berfokus pada bagaimana pemekaran memengaruhi dinamika kekuasaan, partisipasi politik, serta hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Selain itu, pembahasan ini juga menyoroti peran aktor-aktor politik, termasuk elite lokal dan



masyarakat adat, dalam merespons perubahan akibat pemekaran. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman baru tentang tantangan dan peluang pascapemekaran (Zhao et al. 2025), tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan relevan bagi keberlanjutan desentralisasi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pemekaran daerah di Merauke terhadap stabilitas politik, termasuk dinamika kekuasaan, partisipasi politik, serta hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami dampak pemekaran daerah terhadap stabilitas politik di Merauke. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena politik yang kompleks (Lim 2024), terutama dalam melihat interaksi antara pemerintah, elite lokal, dan masyarakat dalam konteks pemekaran. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran rinci tentang situasi politik di Merauke pascapemekaran serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas politik di daerah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta warga yang terdampak oleh pemekaran (Rami et al. 2021). Data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta artikel jurnal dan media yang membahas isu pemekaran daerah di Merauke. Kombinasi data primer dan sekunder ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan memastikan validitas hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-struktural, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara semi-struktural memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam sekaligus tetap fleksibel dalam menyesuaikan pertanyaan dengan kondisi lapangan (Adeoye-Olatunde and Olenik 2021). Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati langsung dinamika sosial-politik yang terjadi setelah pemekaran daerah, termasuk interaksi antara aktor politik dan respons masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengkaji berbagai dokumen resmi dan publikasi terkait pemekaran, yang memberikan perspektif historis dan kebijakan dalam penelitian ini.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis ini membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas politik di Merauke setelah pemekaran. Selain itu, teknik triangulasi data diterapkan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian (Arias Valencia 2022). Dengan triangulasi, kemungkinan bias dalam interpretasi data dapat diminimalkan, sehingga hasil penelitian lebih objektif dan akurat.

Sebagai batasan penelitian, studi ini hanya berfokus pada wilayah Merauke sebagai salah satu daerah yang mengalami pemekaran di Papua. Penelitian ini tidak mencakup seluruh daerah pemekaran di Papua, sehingga hasil yang diperoleh bersifat kontekstual dan tidak serta-merta dapat



digeneralisasikan ke seluruh wilayah. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan perkembangan pemekaran yang sedang berlangsung, sehingga kondisi yang berubah seiring waktu perlu menjadi pertimbangan dalam interpretasi hasil (Kowalska-Krochmal and Dudek-Wicher 2021). Dengan batasan ini, penelitian tetap berusaha memberikan kontribusi akademik yang relevan dalam memahami dinamika pemekaran daerah dan stabilitas politik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemekaran daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Merauke, menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di tingkat daerah. Namun, proses pemekaran daerah ini tidak hanya berdampak pada aspek pemerintahan dan pembangunan ekonomi, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap stabilitas politik. Dalam konteks Kabupaten Merauke, pemekaran daerah berpotensi mempengaruhi dinamika politik lokal, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta interaksi antara berbagai kelompok politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pemekaran daerah memengaruhi sistem politik Indonesia, khususnya di Merauke, dalam hal kestabilan politik, partisipasi masyarakat, dan integrasi antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas politik di Merauke pasca pemekaran daerah, serta untuk menggali implikasi dari perubahan politik yang terjadi di wilayah tersebut.

Tabel 1: Dampak Pemekaran terhadap Tata Kelola Pemerintahan di Merauke

Aspek	Dampak Pemekaran
Peningkatan jumlah entitas pemerintahan baru	Banyaknya daerah baru yang terbentuk setelah pemekaran, namun masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas administratif dan manajemen pemerintahan.
Tantangan dalam penyediaan layanan publik	Kurangnya tenaga kerja profesional, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar yang menghambat pelayanan publik yang optimal.
Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat	Kemandirian fiskal daerah baru masih rendah, sehingga sebagian besar anggaran operasional dan pembangunan bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Tabel di atas menunjukkan berbagai dampak pemekaran terhadap tata kelola pemerintahan di Merauke, khususnya dalam aspek administratif, layanan publik, dan keuangan daerah. Pemekaran daerah menghasilkan entitas pemerintahan baru yang masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas administratif, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan pemerintahan. Selain itu, tantangan dalam penyediaan layanan publik juga muncul akibat kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi isu utama, karena daerah hasil pemekaran belum memiliki kemandirian fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan secara mandiri. Jika tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat,



tantangan ini dapat menghambat tujuan utama pemekaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

Tabel 2: Dinamika Politik Pascapemekaran di Merauke

Aspek	Deskripsi
Persaingan Politik Lokal	Terjadi kompetisi antara elite politik, masyarakat adat, dan pendatang dalam perebutan jabatan pemerintahan serta pengaruh terhadap kebijakan daerah.
Pergeseran Struktur Kekuasaan	Pemekaran menyebabkan perubahan dalam distribusi kekuasaan, menimbulkan ketegangan antara kelompok yang merasa diuntungkan dan yang merasa terpinggirkan.
Konsolidasi Pemerintahan Daerah Baru	Pemerintah daerah berupaya membangun legitimasi melalui kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok, termasuk dengan membangun koalisi politik.

Tabel di atas menggambarkan berbagai dinamika politik yang terjadi pascapemekaran daerah di Merauke. Persaingan politik yang muncul antara elite lokal, masyarakat adat, dan pendatang mencerminkan perebutan kekuasaan dalam struktur pemerintahan baru, yang dapat memicu ketegangan sosial dan politik. Pergeseran dalam distribusi kekuasaan juga menyebabkan ketidakseimbangan dalam representasi kelompok tertentu, menimbulkan potensi konflik di tingkat lokal. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah baru perlu melakukan konsolidasi politik guna membangun legitimasi serta memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, sehingga stabilitas politik tetap terjaga.

Tabel 3. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Pascapemekaran di Merauke

Aspek	Permasalahan	Dampak
Ketimpangan Distribusi Sumber Daya dan Pembangunan	Pembangunan lebih terfokus di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan.	Masyarakat di daerah pedesaan mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan layanan publik.
Dampak Pemekaran terhadap Masyarakat Adat	Masyarakat adat mengalami kesulitan dalam mengakses peluang ekonomi dan jabatan politik.	Ketimpangan dalam representasi politik dan ekonomi, serta meningkatnya potensi konflik sosial.
Kurangnya Integrasi Ekonomi	Wilayah hasil pemekaran belum memiliki sistem ekonomi yang terhubung secara optimal.	Pertumbuhan ekonomi daerah baru berjalan lambat dan meningkatkan ketergantungan pada bantuan pusat.

Makna dari tabel di atas menunjukkan bahwa pemekaran daerah di Merauke telah menimbulkan berbagai bentuk ketimpangan, terutama dalam aspek pembangunan, ekonomi, dan representasi politik masyarakat adat. Ketimpangan distribusi sumber daya mengakibatkan disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, sementara masyarakat adat menghadapi tantangan dalam memperoleh akses terhadap peluang ekonomi dan politik. Selain itu, kurangnya integrasi ekonomi menyebabkan pertumbuhan wilayah baru berjalan lambat dan semakin meningkatkan ketergantungan pada pemerintah pusat. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan ini dapat memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik di daerah pemekaran.

**Tabel 4: Stabilitas Politik di Merauke Pascapemekaran**

Aspek	Deskripsi
Potensi Konflik Horizontal	Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan daerah baru memicu ketegangan antar kelompok masyarakat, terutama antara masyarakat adat dan pendatang, serta antara elite politik lokal.
Kebutuhan Kebijakan Afirmatif	Perlunya kebijakan yang memastikan representasi politik yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok minoritas agar mereka memiliki peran yang lebih signifikan dalam pemerintahan daerah baru.
Upaya Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas	Pemerintah daerah dan pusat berupaya menjaga stabilitas melalui pendekatan dialogis, musyawarah dengan berbagai pihak, serta penyalarsan kebijakan antara pusat dan daerah untuk mengurangi potensi konflik dan memperkuat kohesi sosial.

Tabel di atas menggambarkan tantangan dan strategi dalam menjaga stabilitas politik di Merauke pascapemekaran. Ketidakpuasan terhadap kebijakan daerah baru dapat memicu konflik horizontal, terutama akibat perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang memastikan representasi politik lebih inklusif, khususnya bagi masyarakat adat yang sering kali merasa terpinggirkan. Untuk mengatasi potensi instabilitas, pemerintah berupaya menerapkan pendekatan dialogis dan menyesuaikan kebijakan pusat-daerah agar pemekaran dapat berjalan sesuai tujuan, tanpa memperburuk ketegangan sosial dan politik di wilayah tersebut.

Pembahasan

Pemekaran daerah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem pemerintahan desentralisasi (Fikri and Wibisono 2023). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar utama dalam pengaturan pemekaran wilayah, yang bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kebijakan pemekaran juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Provinsi Papua Selatan, yang mengatur pembentukan daerah baru, termasuk Merauke, sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menentukan kriteria pemekaran, termasuk aspek administratif, teknis, dan fiskal, guna memastikan bahwa daerah yang dimekarkan memiliki kesiapan dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri.

Tujuan utama dari pemekaran daerah adalah untuk mempercepat desentralisasi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan layanan publik bagi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal (Organization 2021). Dengan adanya pemekaran, diharapkan distribusi anggaran dan pembangunan dapat lebih merata, sehingga wilayah yang sebelumnya kurang berkembang dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pemekaran juga bertujuan untuk memperkuat identitas lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah, terutama dalam konteks wilayah dengan keberagaman etnis dan budaya yang tinggi, seperti Papua. Dengan demikian, pemekaran daerah bukan hanya sekadar pemisahan administratif, tetapi juga upaya strategis untuk mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.



Meskipun memiliki tujuan yang positif, pelaksanaan pemekaran daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah yang baru dimekarkan, yang sering kali masih terbatas. Pemerintah daerah yang baru sering mengalami kendala dalam membangun birokrasi yang efektif, mengelola keuangan daerah, serta menjalankan fungsi pelayanan publik dengan optimal. Selain itu, pemekaran juga dapat memicu konflik politik dan sosial, terutama terkait dengan distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya (Organization 2021). Tidak jarang, pemekaran justru memperburuk ketimpangan ekonomi dan memunculkan persaingan antar kelompok, terutama antara masyarakat adat dan pendatang. Oleh karena itu, keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada perencanaan yang matang, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemekaran daerah di Merauke dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, termasuk keinginan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat identitas dan aspirasi politik masyarakat setempat. Sebagai salah satu wilayah di Papua yang memiliki luas geografis yang sangat besar, pemerintahan yang terpusat di kota Merauke sering kali dianggap kurang efektif dalam menjangkau daerah-daerah terpencil (Organization 2021). Selain itu, adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan mendorong masyarakat untuk mengajukan pemekaran sebagai solusi agar kebijakan pembangunan lebih merata. Faktor lain yang menjadi pendorong adalah dinamika sosial-politik, di mana masyarakat adat dan kelompok elite lokal melihat pemekaran sebagai peluang untuk meningkatkan representasi politik dan mendapatkan hak yang lebih besar dalam mengelola sumber daya alam di wilayah mereka.

Dalam proses pemekaran, berbagai aktor memainkan peran penting, baik dari tingkat nasional maupun lokal. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri dan DPR, berperan dalam memberikan persetujuan serta mengalokasikan anggaran bagi daerah baru. Pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten Merauke sebelum pemekaran, memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan administrasi pemerintahan serta infrastruktur dasar bagi wilayah yang dimekarkan (Beery, Olsson, and Vitestam 2021). Di sisi lain, elite politik lokal turut berperan dalam memperjuangkan pemekaran dengan membangun dukungan politik dan mobilisasi massa. Masyarakat adat juga menjadi aktor utama, terutama dalam mengadvokasi hak-hak mereka agar pemekaran tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok tetapi juga memberikan manfaat bagi komunitas lokal yang selama ini merasa terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan.

Setelah pemekaran, struktur pemerintahan baru menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Pembentukan daerah baru membutuhkan kesiapan administrasi yang matang, termasuk pembentukan lembaga pemerintahan, pengisian jabatan birokrasi, serta penyusunan kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Zhang, Zhao, and Dong 2021). Namun, salah satu tantangan utama yang muncul adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja yang kompeten untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Selain itu, muncul persoalan terkait distribusi kekuasaan di tingkat lokal, di mana terjadi persaingan antar kelompok dalam memperebutkan posisi strategis dalam pemerintahan daerah baru. Jika tidak dikelola dengan baik, tantangan-tantangan ini dapat menghambat efektivitas pemekaran serta menimbulkan instabilitas politik yang berpotensi menghambat tujuan awal dari kebijakan pemekaran itu sendiri.



Pemekaran daerah di Merauke membawa perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan dan distribusi jabatan politik di pemerintahan daerah baru. Sebagai konsekuensi dari pembentukan wilayah administrasi yang lebih kecil (Belitski et al. 2022), terjadi pergeseran dalam pola kekuasaan, di mana posisi strategis dalam pemerintahan kini didistribusikan kepada elite-elite politik lokal yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses dalam sistem politik lama. Namun, dalam praktiknya, distribusi jabatan politik ini tidak selalu berjalan secara merata dan adil, karena sering kali lebih menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan atau elite pusat. Fenomena ini dapat menciptakan dominasi politik oleh kelompok tertentu, sementara kelompok lain, terutama masyarakat adat dan komunitas yang tidak memiliki akses politik kuat, berpotensi terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain pergeseran kekuasaan, pemekaran juga memicu konflik kepentingan antara berbagai kelompok, termasuk elite politik, masyarakat adat, dan pendatang. Pemekaran sering kali diikuti oleh perebutan sumber daya, baik dalam bentuk jabatan pemerintahan, akses terhadap anggaran daerah, maupun pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat sering kali merasa bahwa hak-hak mereka semakin tergerus akibat kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok pendatang atau investor yang memiliki akses lebih besar terhadap jaringan politik dan ekonomi (Pugh 2021). Ketegangan ini berpotensi meningkat ketika pemekaran tidak disertai dengan mekanisme distribusi kekuasaan yang adil dan inklusif, sehingga menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang baru terbentuk.

Dalam konteks partisipasi politik dan representasi masyarakat, pemekaran memberikan peluang sekaligus tantangan bagi demokrasi lokal. Di satu sisi, pemekaran membuka ruang partisipasi yang lebih luas dengan meningkatnya jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif yang dapat diisi oleh masyarakat setempat. Namun, di sisi lain, tantangan muncul dalam memastikan bahwa partisipasi politik ini benar-benar inklusif dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Proses politik di daerah hasil pemekaran masih sering didominasi oleh kepentingan elite lokal yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi, sementara kelompok masyarakat kecil, terutama masyarakat adat, sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh representasi yang proporsional. Oleh karena itu, tanpa mekanisme yang tepat, pemekaran daerah dapat memperkuat oligarki politik di tingkat local (Marandici 2021), alih-alih menciptakan demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif bagi seluruh elemen masyarakat.

Pemekaran daerah di Merauke tidak hanya membawa peluang bagi pembangunan, tetapi juga memunculkan ketegangan sosial dan potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas politik. Salah satu faktor utama yang memicu ketegangan adalah perebutan sumber daya dan kekuasaan di tingkat lokal, terutama antara elite politik, masyarakat adat, dan pendatang. Perubahan struktur pemerintahan akibat pemekaran sering kali menimbulkan ketidakpuasan, terutama jika distribusi kekuasaan dan akses terhadap ekonomi dianggap tidak adil. Selain itu, perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok tersebut dapat memperburuk fragmentasi social (Schünemann et al. 2022), yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat berujung pada konflik terbuka atau ketidakstabilan politik yang berkepanjangan.

Dalam menghadapi dinamika ini, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik melalui kebijakan dan program integrasi sosial yang inklusif. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah memastikan keterwakilan yang adil bagi seluruh kelompok



masyarakat dalam pemerintahan daerah yang baru terbentuk. Selain itu, pemerintah perlu menginisiasi program pembangunan yang merata serta mendorong dialog antara kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk mengurangi potensi konflik. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam tata kelola yang transparan dan akuntabel (Yigitcanlar et al. 2021), sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintahan yang baru. Dengan pendekatan yang holistik dan responsif, pemekaran daerah dapat berjalan lebih stabil tanpa menimbulkan ketidakpuasan yang berlebihan.

Untuk menilai sejauh mana pemekaran daerah di Merauke efektif dalam memperkuat stabilitas politik, diperlukan evaluasi berbasis indikator tertentu, seperti tingkat partisipasi politik masyarakat, efektivitas pemerintahan lokal, dan jumlah konflik yang muncul pascapemekaran. Jika pemekaran berhasil menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kohesi social (Jewett et al. 2021), maka dapat dikatakan bahwa pemekaran telah berjalan sesuai dengan tujuannya. Namun, jika yang terjadi justru peningkatan ketegangan politik, ketimpangan pembangunan, dan lemahnya legitimasi pemerintahan daerah baru, maka perlu ada revisi kebijakan untuk memastikan bahwa pemekaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemekaran daerah di Merauke mampu menciptakan stabilitas politik yang diharapkan.

Salah satu langkah utama dalam memperkuat kapasitas pemerintahan daerah baru adalah dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memperbaiki sistem administrasi pemerintahan. Banyak daerah hasil pemekaran menghadapi kendala dalam tata kelola pemerintahan akibat keterbatasan tenaga kerja yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang administrasi publik. Oleh karena itu, pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat daerah perlu menjadi prioritas dalam memastikan efektivitas pemerintahan. Selain itu, penguatan infrastruktur kelembagaan, termasuk sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan dan akuntabel, menjadi faktor penting dalam mendukung stabilitas pemerintahan daerah baru. Pemerintah pusat juga perlu memberikan bimbingan teknis dan supervisi yang berkelanjutan agar daerah pemekaran dapat berkembang secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap dana transfer dari pusat (Khan and Malaika 2021).

Selain memperkuat kapasitas pemerintahan daerah, kebijakan afirmatif perlu diterapkan untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat adat di daerah pemekaran. Salah satu tantangan utama dalam pemekaran adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya dan jabatan politik, di mana masyarakat adat sering kali merasa terpinggirkan dalam dinamika politik lokal. Kebijakan afirmatif dapat berupa alokasi khusus dalam rekrutmen tenaga kerja pemerintahan (Lee 2021), keterwakilan masyarakat adat dalam struktur pemerintahan daerah, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat adat dapat lebih berperan dalam pembangunan dan tidak sekadar menjadi objek dalam proses pemekaran. Selain itu, pendekatan partisipatif dalam pengambilan kebijakan harus diperkuat agar setiap kelompok masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya dan merasa menjadi bagian dari proses pembangunan daerah.

Untuk memastikan pemekaran yang lebih efektif dalam mendukung stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan model pemekaran yang berbasis pada kajian akademik dan



evaluasi empiris terhadap daerah-daerah yang telah mengalami pemekaran sebelumnya. Model ini harus memperhitungkan kesiapan daerah, baik dari segi ekonomi, demografi, maupun kapasitas pemerintahan sebelum pemekaran disetujui. Selain itu, perlu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi pascapemekaran guna mengukur efektivitas kebijakan yang diterapkan serta melakukan perbaikan yang diperlukan (Sakas et al. 2023). Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, menjadi kunci utama dalam menciptakan pemekaran yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga benar-benar membawa kesejahteraan dan stabilitas bagi masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Pemekaran daerah di Merauke memiliki dampak yang kompleks terhadap tata kelola pemerintahan, dinamika politik, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas administratif, ketimpangan distribusi sumber daya, serta ketegangan politik antara elite lokal, masyarakat adat, dan pendatang. Oleh karena itu, strategi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pemekaran berjalan sesuai tujuan awalnya. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah, penerapan kebijakan afirmatif bagi masyarakat adat, serta penerapan model pemekaran berbasis kajian akademik dan evaluasi berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mendukung stabilitas politik dan pembangunan di daerah hasil pemekaran. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terarah, pemekaran dapat menjadi instrumen desentralisasi yang efektif, bukan sekadar pemecahan wilayah administratif tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeoye-Olatunde, Omolola A., and Nicole L. Olenik. 2021. "Research and Scholarly Methods: Semi-structured Interviews." *Journal of the American College of Clinical Pharmacy* 4(10):1358–67.
- Arias Valencia, María Mercedes. 2022. "Principles, Scope, and Limitations of the Methodological Triangulation." *Investigacion y Educacion En Enfermeria* 40(2).
- Azizah, Nurul, Joseph Okwesili Nkwede, and Mohammad Armoyu. 2021. "The Octopus-like Power of Pesantren Dynasty in the Dynamics of Local Politics." *Cogent Social Sciences* 7(1):1962056.
- Beery, Thomas, Matilda Rask Olsson, and Moa Vitestam. 2021. "Covid-19 and Outdoor ecreation Management: Increased Participation, Connection to Nature, and a Look to Climate Adaptation." *Journal of Outdoor Recreation and Tourism* 36:100457.
- Belitski, Maksim, Christina Guenther, Alexander S. Kritikos, and Roy Thurik. 2022. "Economic Effects of the COVID-19 Pandemic on Entrepreneurship and Small Businesses." *Small Business Economics* 1–17.
- Fikri, Sultoni, and Rizky Bangun Wibisono. 2023. "Principle of Original Authority in Territorial Decentralization." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2(1):131–52.
- Le Galès, Patrick. 2021. "The Rise of Local Politics: A Global Review." *Annual Review of Political Science* 24(1):345–63.
- Garbis, Zoe, Erin McCarthy, Robert W. Orttung, Gregory Poelzer, Melissa Shaiman, and Jacob



- Tafrate. 2023. "Governing the Green Economy in the Arctic." *Climatic Change* 176(4):33.
- Hoffmann, Samuel. 2022. "Challenges and Opportunities of Area-Based Conservation in Reaching Biodiversity and Sustainability Goals." *Biodiversity and Conservation* 31(2):325–52.
- Jewett, Rae L., Sarah M. Mah, Nicholas Howell, and Mandi M. Larsen. 2021. "Social Cohesion and Community Resilience during COVID-19 and Pandemics: A Rapid Scoping Review to Inform the United Nations Research Roadmap for COVID-19 Recovery." *International Journal of Health Services* 51(3):325–36.
- Khan, Mr Ashraf, and Majid Malaika. 2021. *Central Bank Risk Management, Fintech, and Cybersecurity*. International Monetary Fund.
- Kowalska-Krochmal, Beata, and Ruth Dudek-Wicher. 2021. "The Minimum Inhibitory Concentration of Antibiotics: Methods, Interpretation, Clinical Relevance." *Pathogens* 10(2):165.
- Lee, Alexander. 2021. "Does Affirmative Action Work? Evaluating India's Quota System." *Comparative Political Studies* 54(9):1534–64.
- Lim, Weng Marc. 2024. "What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines." *Australasian Marketing Journal* 14413582241264620.
- Makuyana, Tawanda, Regina Makoni, and Serena Lucrezi. 2024. "Conservation-Based Tourism Development, Climate Change, Inclusion of Locals, and Post-Human-Wildlife Co-Existence Conflicts: A Case Study of Gonarezhou National Park." Pp. 225–57 in *Tourism and Climate Change in the 21st Century: Challenges and Solutions*. Springer.
- Marandici, Ion. 2021. "Taming the Oligarchs? Democratization and State Capture: The Case of Moldova." *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization* 29(1):63–89.
- Organization, World Health. 2021. *WHO Guideline on Health Workforce Development, ttraction, Recruitment and Retention in Rural and Remote Areas*. World Health Organization.
- Pajarianto, Hadi, Imam Pribad, and Puspa Sari. 2022. "Tolerance between Religions through the Role of Local Wisdom and Religious Moderation." *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 78(4).
- Pugh, Jeffrey D. 2021. *The Invisibility Bargain: Governance Networks and Migrant Human Security*. Oxford University Press.
- Rami, Aizuddin Md, Faiq Aziz, Zeinab Zaremohzzabieh, and Abdullah Ibrahim. 2021. "Assessing the Challenges of Local Leaders in Rural Community Development: A Qualitative Study in Malaysia." *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 29.
- Sakas, Zoe, Kyra A. Hester, Katie Rodriguez, Saly Amos Diatta, Anna S. Ellis, Daouda Malick Gueye, Dawn Mapatano, Pr Souleymane Mboup, Emily Awino Ogutu, and Chenmua Yang. 2023. "Critical Success Factors for High Routine Immunization Performance: A Case Study of Senegal." *Vaccine: X* 14:100296.
- Schünemann, Holger J., Marge Reinap, Thomas Piggott, Erki Laidmäe, Kristina Köhler, Mariliis Põld, Brendalynn Ens, Alar Irs, Elie A. Akl, and Carlos A. Cuello. 2022. "The Ecosystem of Health Decision Making: From Fragmentation to Synergy." *The Lancet Public Health* 7(4):e378–90.
- Siangchokyoo, Nathapon, Ryan L. Klinger, and Emily D. Champion. 2020. "Follower Transformation as the Linchpin of Transformational Leadership Theory: A Systematic Review and Future Research Agenda." *The Leadership Quarterly* 31(1):101341.



- Trzciński, Krzysztof. 2022. “Consociationalism Meets Centripetalism: Hybrid Power-Sharing.” *Nationalism and Ethnic Politics* 28(3):313–31.
- Yigitcanlar, Tan, Juan M. Corchado, Rashid Mehmood, Rita Yi Man Li, Karen Mossberger, and Kevin Desouza. 2021. “Responsible Urban Innovation with Local Government Artificial Intelligence (AI): A Conceptual Framework and Research Agenda.” *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 7(1):71.
- Zhang, Liwei, Ji Zhao, and Weiwei Dong. 2021. “Street-level Bureaucrats as Policy entrepreneurs: Action Strategies for Flexible Community Governance in China.” *Public Administration* 99(3):469–83.
- Zhao, Le, Chao Yuan, Ke Shan, Mingzhong Gao, Xiting Long, Meng Xu, Tianxiang Ao, and Kun Yang. 2025. “Expandable Profile Liner Technology for Mitigating Lost Circulation and Wellbore Instability in Geothermal Drilling.” *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 209:115109.